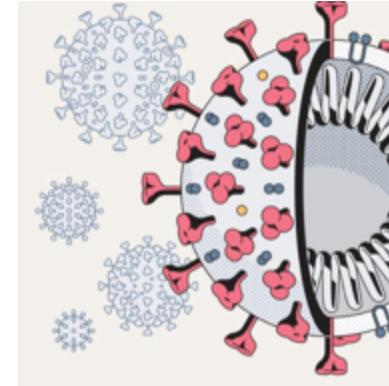


Dana Stimulus Penanggulangan Covid-19: Isu Prioritas dan Akuntabilitas APBN dan APBD



Webinar Rancak Publik & Unand
17 Juni 2020

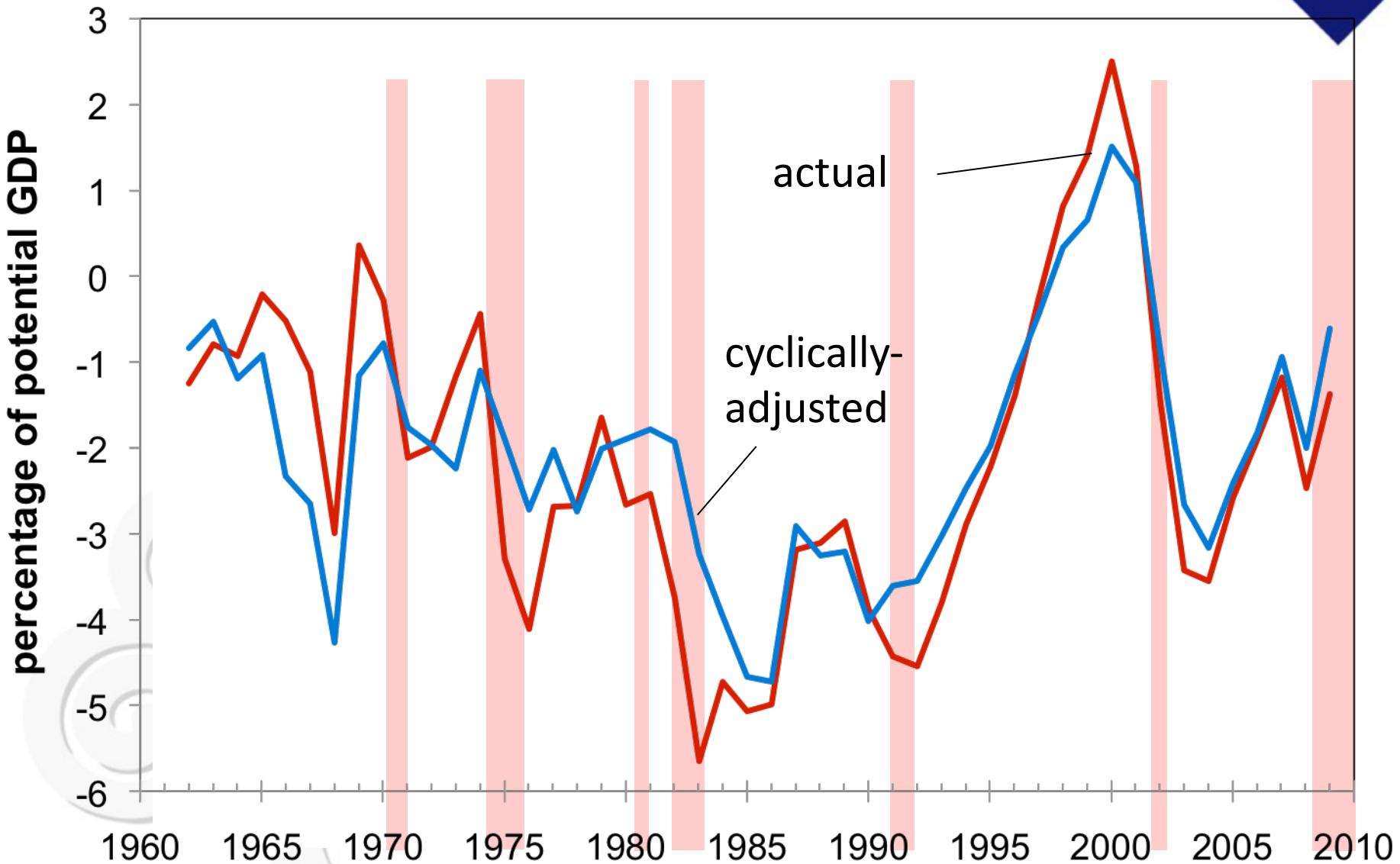
Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada



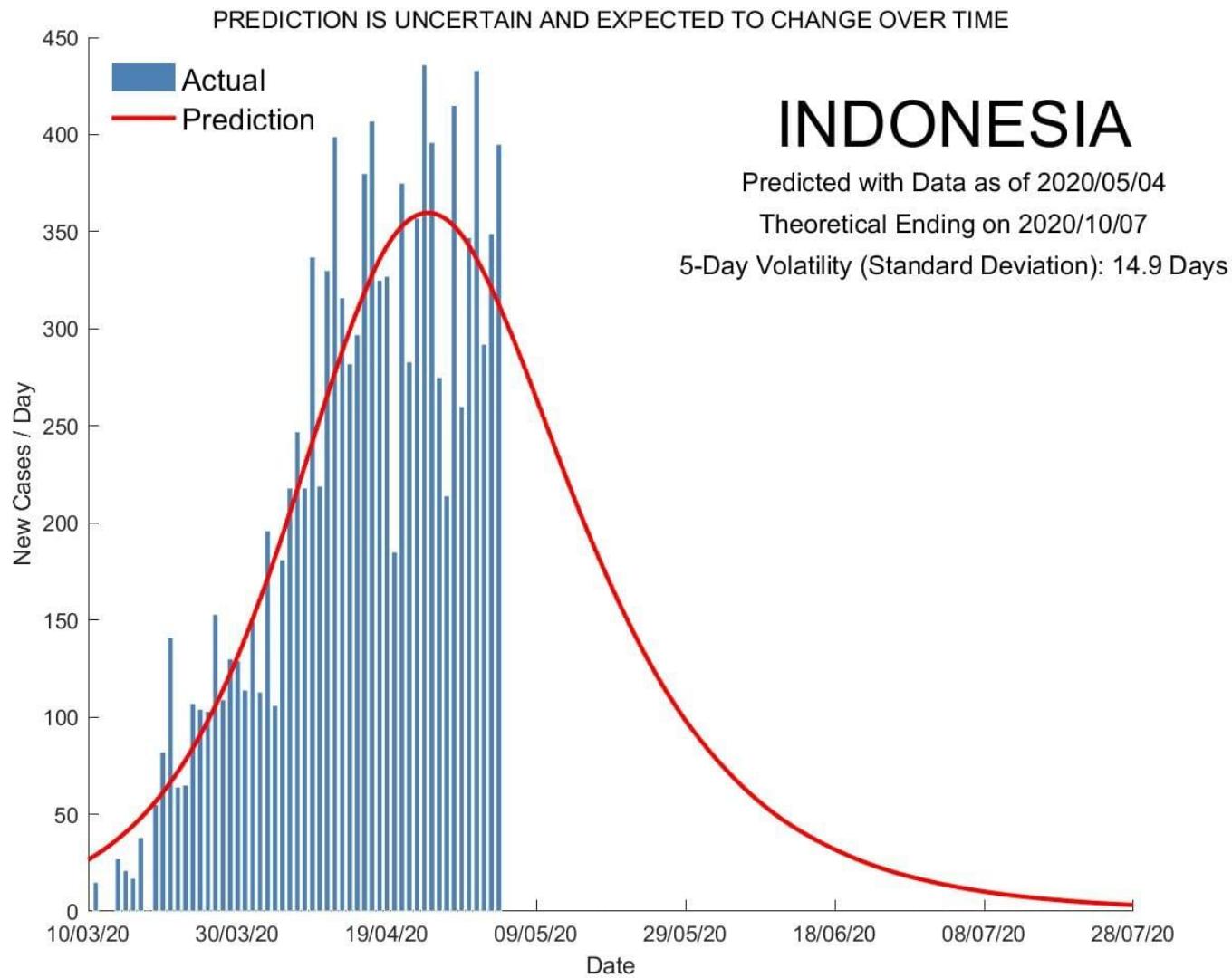
Talking Points

1. Stimulus anggaran sebagai kebijakan *counter-cyclical*.
2. Pertarungan paradigma penanggulangan:
 - *Social-Distancing* (Hensley, 2020) vs. *Herd Immunity* (Gordis, 2013).
3. Prioritas dan konflik kepentingan dalam implementasi kedaruratan.
4. Peran *civil-society* dalam penguatan akuntabilitas anggaran.

Penganggaran Yang Ideal: Counter-Cyclical



Baru akan berakhir 7 Oktober 2020... (?)

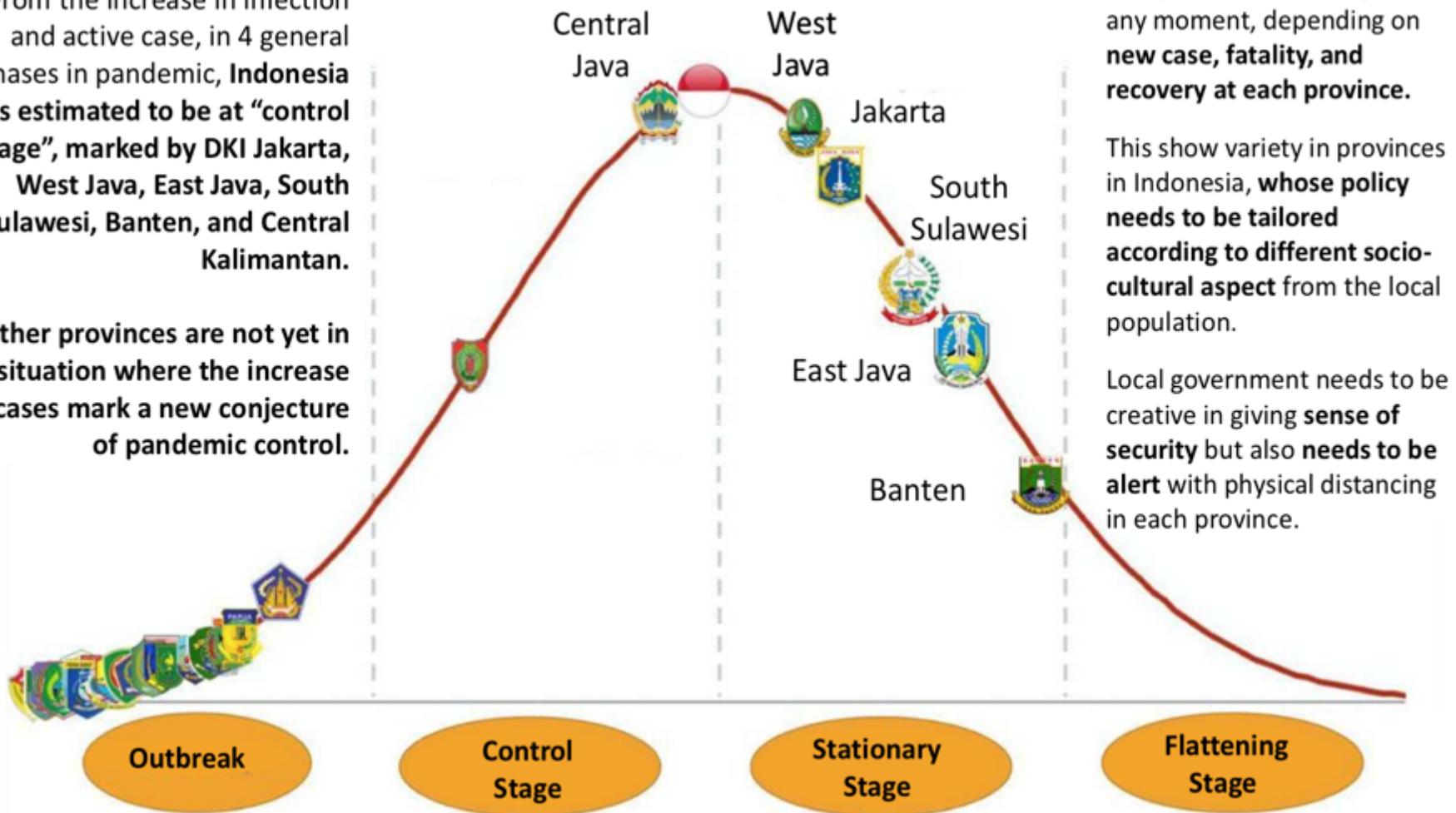




Banyak Provinsi belum melewati puncak kurva...

From the increase in infection and active case, in 4 general phases in pandemic, Indonesia is estimated to be at “control stage”, marked by DKI Jakarta, West Java, East Java, South Sulawesi, Banten, and Central Kalimantan.

Other provinces are not yet in a situation where the increase in cases mark a new conjecture of pandemic control.



Sumber: L. Panjaitan, Rakor Kementerian Polhukam, 7 Mei 2020



LAPORAN MEDIA HARIAN COVID19 TANGGAL 9 JUNI 2020 PUKUL 12.00 WIB

data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 9 JUNI 2020			JUMLAH KASUS DENGAN FOLLOWUP SPESIMEN 2X NEGATIF			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 8 JUNI 2020	9 JUNI 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 8 JUNI 2020	9 JUNI 2020	KUM	S/D 8 JUNI 2020	9 JUNI 2020	KUM
1	ACEH	20	0	20	18	0	18	1	0	1
2	BALI	594	14	608	377	32	409	5	0	5
3	BANTEN	1046	15	1061	372	19	391	71	1	72
4	BANGKA BELITUNG	102	19	121	36	5	41	1	0	1
5	BENGKULU	92	0	92	40	6	46	4	0	4
6	DI YOGYAKARTA	247	2	249	185	6	191	8	0	8
7	DKI JAKARTA	8123	232	8355	3206	165	3371	529	4	533
8	JAMBI	103	0	103	27	0	27	0	0	0
9	JAWA BARAT	2423	25	2448	952	10	962	161	0	161
10	JAWA TENGAH	1642	32	1674	428	80	508	98	5	103
11	JAWA TIMUR	6313	220	6533	1499	85	1584	502	12	514
12	KALIMANTAN BARAT	210	24	234	117	0	117	4	0	4
13	KALIMANTAN TIMUR	338	13	351	213	3	216	3	0	3
14	KALIMANTAN TENGAH	504	18	522	202	0	202	28	0	28
15	KALIMANTAN SELATAN	1347	91	1438	117	1	118	100	4	104
16	KALIMANTAN UTARA	169	1	170	129	1	130	2	0	2
17	KEPULAUAN RIAU	228	0	228	120	2	122	15	1	16
18	NUSA TENGGARA BARAT	822	8	830	325	0	325	22	3	25
19	SUMATERA SELATAN	1158	30	1188	391	11	402	42	0	42
20	SUMATERA BARAT	626	19	645	351	10	361	27	2	29
21	SULAWESI UTARA	510	41	551	73	0	73	47	0	47
22	SUMATERA UTARA	607	11	618	189	0	189	48	4	52
23	SULAWESI TENGGARA	259	4	263	155	17	172	5	0	5
24	SULAWESI SELATAN	2014	180	2194	673	31	704	94	3	97
25	SULAWESI TENGAH	159	0	159	93	0	93	4	0	4
26	LAMPUNG	145	3	148	102	3	105	11	0	11
27	RIAU	118	2	120	103	4	107	6	0	6
28	MALUKU UTARA	186	4	190	33	0	33	19	0	19
29	MALUKU	307	8	315	80	9	89	8	0	8
30	PAPUA BARAT	179	4	183	74	1	75	2	0	2
31	PAPUA	1090	18	1108	78	0	78	7	0	7
32	SULAWESI BARAT	94	0	94	62	1	63	2	0	2
33	NUSA TENGGARA TIMUR	103	0	103	30	0	30	1	0	1
34	GORONTALO	134	5	139	54	8	62	6	1	7
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	21	0	21	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	32033	1043	33076	10904	510	11414	1883	40	1923

Sumber Data : Kementerian Kesehatan RI

Puncak kurva belum terlewati.

Jatim dan Sulsel menjadi episentrum baru. Provinsi lain mungkin menyusul...

Pelonggaran PSBB diumumkan, kasus positif melonjak...



— KASUS TERKONFIRMASI



Social-Distancing & PSBB Yang Terukur

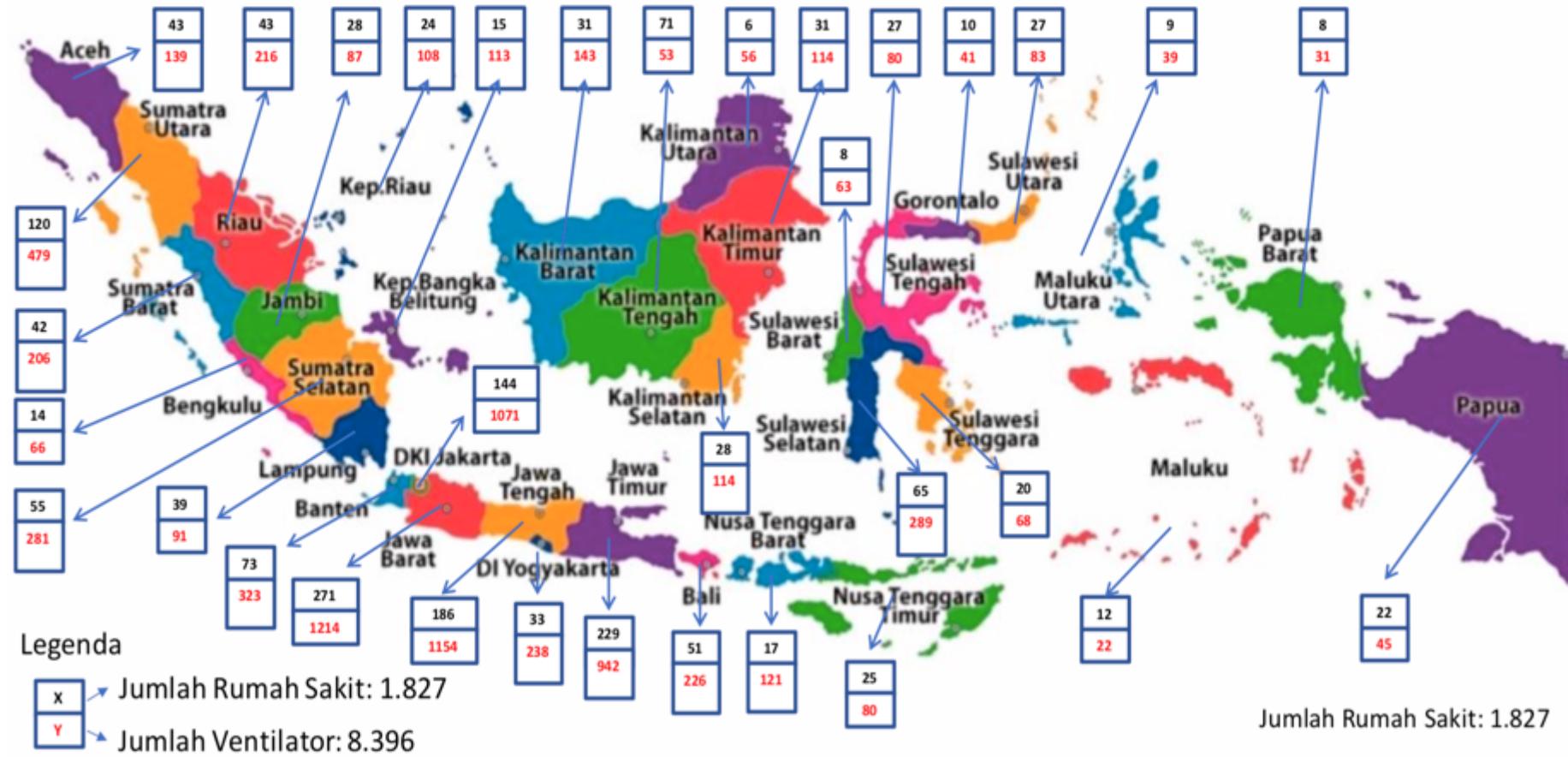


- Arahan Presiden Jokowi pd Satgas Covid-19 (tgl 10/6/2020): “1) Tugas besar belum selesai, kondisi masih dinamis; 2) Daerah jangan sembarangan memutuskan New Normal, perhatikan Rt (*effective reproductive number*), R₀ (*basic reproductive number*), dan tingkat kepatuhan masyarakat”.
- Semua Pemda (34 Provinsi, 496 Kab/Kota) telah membentuk Satgas Covid-19. PSBB diberlakukan di 3 Provinsi dan 7 Kab/Kota. Satgas Covid telah mengijinkan 102 Daerah di 23 Provinsi untuk memulai New Normal. Ironi: 25 Daerah yang mulai menerapkan New Normal justru masih kategori zona merah. Mis: Surabaya, Sidoarjo, Tangerang.



PETA JUMLAH RUMAH SAKIT DAN VENTILATOR DALAM MENDUKUNG PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Sumber data ASPAK Kementerian Kesehatan per 23 Maret 2020



Sumber: Rakor Tingkat Menteri

Kebijakan Strategis Perpu No.1/2020



Gangguan Kesehatan dan Ancaman Jiwa

- Terinfeksi
- Kelaparan
- Kematian
- Mengganggu kesehatan mental (kecemasan, ketakutan, kesedihan)



Gangguan Aktivitas Sosial - Ekonomi

- kehilangan sumber pendapatan
- Penurunan daya beli dan kemampuan konsumsi



Gangguan Sektor Riil dan Peningkatan Risiko di Sektor Keuangan

- terganggu aktivitas usaha (produksi, investasi dan perdagangan)
- potensi menghadapi kebangkrutan
- kenaikan *nonperforming loan* Pembiayaan dan Perbankan
- persoalan *likuiditas* dan *solvabilitas* di sektor keuangan (bank dan nonbank)



Langkah Kesehatan:



Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net):

- aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis
- pengetesan dan penelusuran
- *physical distancing, work and study from home, etc.*
- Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Peningkatan dan perluasan PKH
- Peningkatan dan perluasan Kartu Sembako
- Penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja
- Pembebasan tagihan listrik
- Tambahan bantuan subsidi selisih bunga



Dukungan Dunia Usaha:

- pengurangan lartas impor termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis, percepatan proses eksport-impor dan peningkatan layanan melalui *National Logistics Ecosystem*
- Berbagai insentif dan relaksasi di bidang perpajakan
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui PMN, penempatan investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan
- Berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan: BI, OJK, LPS, dan Pemerintah



Stimulus APBN 2020

STIMULUS EKONOMI DALAM MENGHADAPI DAMPAK VIRUS CORONA

Insentif fiskal & prosedural guna mengembalikan penurunan kinerja perekonomian akibat dampak virus corona

PEMBEBASAN CUKAI ALKOHOL Untuk PENANGANAN COVID-19



- Perluasan bebas Cukai Etil Alkohol untuk produksi hand sanitizer kepada RS, Universitas dll

SE-04/BC2020

1

RELAKSASI PPh IMPOR untuk PERUSAHAAN KITE



PMK-23/2020

3

RELAKSASI PELUNASAN CUKAI & PRODUKSI ROKOK



PMK-30/2020

5

PERCEPATAN LOGISTIK dengan SISTEM NLE



KEP-122/2020
(TIM NLE)

7

- Sistem kolaborasi logistic impor :
- Shipping
 - Port Clearance
 - Warehousing
 - Trucking dll
- Layanan DO Online

2
SE-07/BC2020



- Simplifikasi penyerahan dokumen FTA online

RELAKSASI FASILITAS IMPOR
(DOF FTA ONLINE)

4

• PMK-171/2019
• PMK-70/2012
• SKB DJBC-BNPB



LAYANAN ONLINE
(via INSW & DJBC) :
• Rekomendasi/Ijin BNPB
• Pembebasan BM & PDRI

PERCEPATAN LAYANAN ONLINE
UNTUK PENANGANAN COVID-19

6

PMK-31/2020



- Relaksasi jual lokal produk ALKES dr KB & KITE

RELAKSASI PENJUALAN LOKAL
dari perusahaan KB/KITE

Perppu No.1/2020: Alokasi belanja tambahan APBN 2020: Rp 405,1 triliun. (5,07% dari PDB)

Terdiri dari:

Rp 150 T : pemulihan ekonomi

Rp 110 T : jaring pengaman sosial

Rp 75 T : kesehatan

Rp 70,1 T: dukungan industri.

No.	Komponen	Alokasi Anggaran (Rp triliun)
	Jaring Pengaman Sosial	
1	Program Keluarga Harapan	8,3
2	Kartu Sembako	10,9
3	Kartu Pra-Kerja	10
4	Diskon tarif listrik	3,5
5	Insentif perumahan bagi MBR	1,5
6	Jaring Pengaman Sosial lain	30,8
7	Kebutuhan pokok dan operasi pasar	25
8	Penyesuaian anggaran pendidikan	20
	Belanja Kesehatan	
9	Subsidi iuran BPJS Kesehatan	3
10	Insentif tenaga medis pusat	1,3
11	Insentif tenaga medis daerah	4,6
12	Santunan kematian tenaga kesehatan	0,3
13	Penanangan kesehatan	65,8
	Dukungan Industri	
14	Pajak ditanggung pemerintah	52
15	Bea masuk ditanggung pemerintah	12
16	Stimulus kredit usaha rakyat	6,1

REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020

Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mengalami peningkatan secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir

Uraian (takluk rupiah)	2018			2019				2020			
	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP	Growth (%)	LKPP Unaudited	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP Unaudited	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd Perubahan APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	486,0	35,3	15,5	1.958,6	730,1	37,3	6,4	1.760,9	664,3	37,7	(9,0)
I. Pendapatan Dalam Negeri	684,5	35,5	15,3	1.953,3	729,7	37,4	6,6	1.760,4	663,1	37,7	(9,1)
1. Penerimaan Perpajakan	538,7	35,5	14,5	1.546,1	571,2	36,9	6,0	1.462,6	524,2	36,0	(7,9)
<i>Tax Ratio % (arti ilus)</i>	3,98			10,69	4,00			9,14	3,50		
a. Pendapatan DJP (include Pph Migas)	484,9	36,9	14,2	1.332,7	498,5	37,4	2,6	1.254,1	444,6	35,4	(10,8)
b. Pendapatan DJBC	53,8	26,2	17,4	213,5	72,7	34,0	35,1	208,5	81,7	39,2	12,4
2. PNBP	145,9	35,6	18,1	407,1	158,5	38,9	8,6	297,8	136,9	46,0	(13,6)
II. Penerimaan Hibah	1,4	9,3	580,5	5,4	0,5	9,2	(66,0)	0,5	1,2	240,2	143,7
B. Belanja Negara	779,5	35,2	7,9	2.304,3	855,9	37,1	9,8	2.613,8	843,9	32,3	(1,4)
I. Belanja Pemerintah Pusat	458,0	31,5	18,0	1.493,2	530,8	35,6	16,9	1.851,1	537,3	29,0	1,2
1. Belanja K/L	231,5	27,3	19,9	870,3	288,2	33,1	24,5	836,5	270,4	32,3	(6,2)
2. Belanja Non K/L	226,5	37,2	16,2	622,9	242,6	38,9	7,1	1.014,6	267,0	26,3	10,1
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	321,5	42,4	(4,0)	811,1	325,1	40,1	1,1	742,7	306,6	40,2	(5,7)
1. Transfer Ke Daerah	300,8	43,1	(1,9)	741,3	304,7	41,1	1,3	691,5	277,7	40,2	(8,8)
2. Dana Desa	20,7	34,5	(26,7)	69,8	20,4	29,3	(1,1)	71,2	28,9	40,6	41,3
C. Keseimbangan Primer	19,0	(164,7)	(163,5)	(70,1)	1,3	(1,7)	(93,1)	(517,8)	(33,7)	6,6	(3.710,4)
D. Defisit	(93,5)	34,7	(27,3)	(345,6)	(125,8)	36,4	34,5	(852,9)	(179,6)	21,1	42,8
<i>% Defisit thd PDB</i>	(0,63)			(2,18)	(0,79)			(5,07)	(1,10)		
E. Pembayaran Anggaran	179,4	58,7	(8,3)	398,1	159,9	40,1	(10,1)	852,9	356,1	41,7	122,6
SILPA/SIKPA	85,9			-	34,1			-	176,4		

Pertumbuhan negatif Indonesia Kuartal-II: -0,4 – 2,3 persen

Prediksi pertumbuhan dunia karena resesi global: -6 hingga -3 persen.



Peningkatan Belanja Untuk Covid-19 (Perpres No.54/2020)

Defisit APBN: Rp 1.039,2 T (6,34% dari PDB)

Total anggaran penanganan dampak Covid-19: Rp 686,2 T.

Terdiri dari:

Penanganan kesehatan	: Rp 87,55 T
Perlindungan sosial	: Rp 203,9 T
Insentif pokok	: Rp 120,6 T
Stimulus UMKM	: Rp 123,4 T
Pembiayaan korporasi	: Rp 44,57 T
Anggaran sektoral K/L/D	: Rp 106,11 T.

Masalah Koordinasi dan Penyimpangan



di Tiap Jenjang ...

- Kemenkeu, Kemenko PMK, Gubernur DKI Jakarta: Bansos untuk 4,7 juta KPM. Kesepakatan awal: 1,1 T Pemprov, 3,6 T Pempus. Menteri bersitegang dg Gubernur krn Pemprov minta seluruhnya ditanggung Pempus. (Rabu, 6/5/2020). Belakangan, Gubernur menyatakan ada dana Bansos 5,03 T (Sabtu, 9/5/2020). Mana yang betul?
- Program Keluarga Harapan dengan total Rp 37,4 triliun bagi 10 juta keluarga dan pembagian Sembako senilai Rp 43,6 bagi 20 juta keluarga, banyak yang salah sasaran;
 1. Pekanbaru: banyak warga protes karena bantuan yang mereka terima dipangkas untuk alasan yang kurang jelas.
 2. Bogor: warga perumahan elit tiba-tiba termasuk yang menerima bantuan tunai.
 3. Bolmong, Sulawesi Utara: seorang Bupati terang-terangan memprotes kebijakan Kementerian Sosial karena rumitnya prosedur alokasi bantuan.



Masalah Akuntabilitas Anggaran

- Pasal 27 Perppu 2020: Semua biaya yg dikeluarkan pada masa krisis “bukan merupakan kerugian negara”. → Berpotensi disalahgunakan.
- Dilema pengadaan alkes (APD, rapid-test): keterlambatan akan mempercepat penyebaran virus; mempercepat lelang, bnyk PPK di Kemenkes takut terkena delik korupsi.
- Pilihan rapid-test:
 - Imunoglobulin test (Rp 150 rb per unit): 30 menit, akurasi 85%, tidak membaca konsentrasi virus, shg bisa menjadi “alarm palsu”.
 - PCR (Polymerase Chain Reaction), Rp 2 jt per unit: 3 hari, akurasi 90%, perlu lab bio-safety level-2.
 - Tes molekuler cepat (Rp 330 rb per cartridge): 1 jam, akurasi 99%, pengadaan cepat sulit (semua negara pesan).



Konflik Kepentingan #1

- Target pemerintah: 1 jt tes cepat di seluruh tanahair.
- Di Bali, 39 anggota DPRD minta dites bahkan sebelum petugas medis di RS.
- Karena keterlambatan pembagian rapid-test oleh pemerintah, RS bnyk yg mengimpor sendiri.
- Larangan ekspor masker, APD, antiseptik karena kapasitas produksi DN hanya 913 rb/bulan (Permendag 23/2020); tetapi bnyk pengusaha yg tetap mengekspor melalui kolusi dg pejabat Kemenkes & Kemendag.



Konflik Kepentingan #2

- Koordinasi kebijakan Pempus vs Pemda: Data positif, PDP, ODP; Pempus: PSBB, Pemda: *lock-down* (DKI, Jabar, Purwakarta, Tegal, Gayu Luwes).
- Stafsus Presiden yg terpaksa mundur: 1) Adamas BS Devara, Ruang-Guru dijadikan mitra dlm pelatihan pra-kerja. 2) Andi Taufan GP, membuat katebelece ke Camat spy mendukung PT Amartha Fintek dlm program Covid-19.
- Kriminalisasi pegiat sosial yg mengkritik data Covid-19: Ravio Patra ditangkap Polda Metro Jaya dg tuduhan yg direkayasa dari akun WA yg diretas; 3 mhs ditangkap dg tuduhan bagian dari Anarko Sindikalis di Malang; intimidasi terhadap anggota dapur umum Solidaritas Pangan Jogja (Walhi).



Penyimpangan terjadi hingga level Desa atau pembagi.

Bansos Covid-19 Warga Tangerang Disunat Rp100 ribu, Kades: Sekedar untuk Beli Rokok

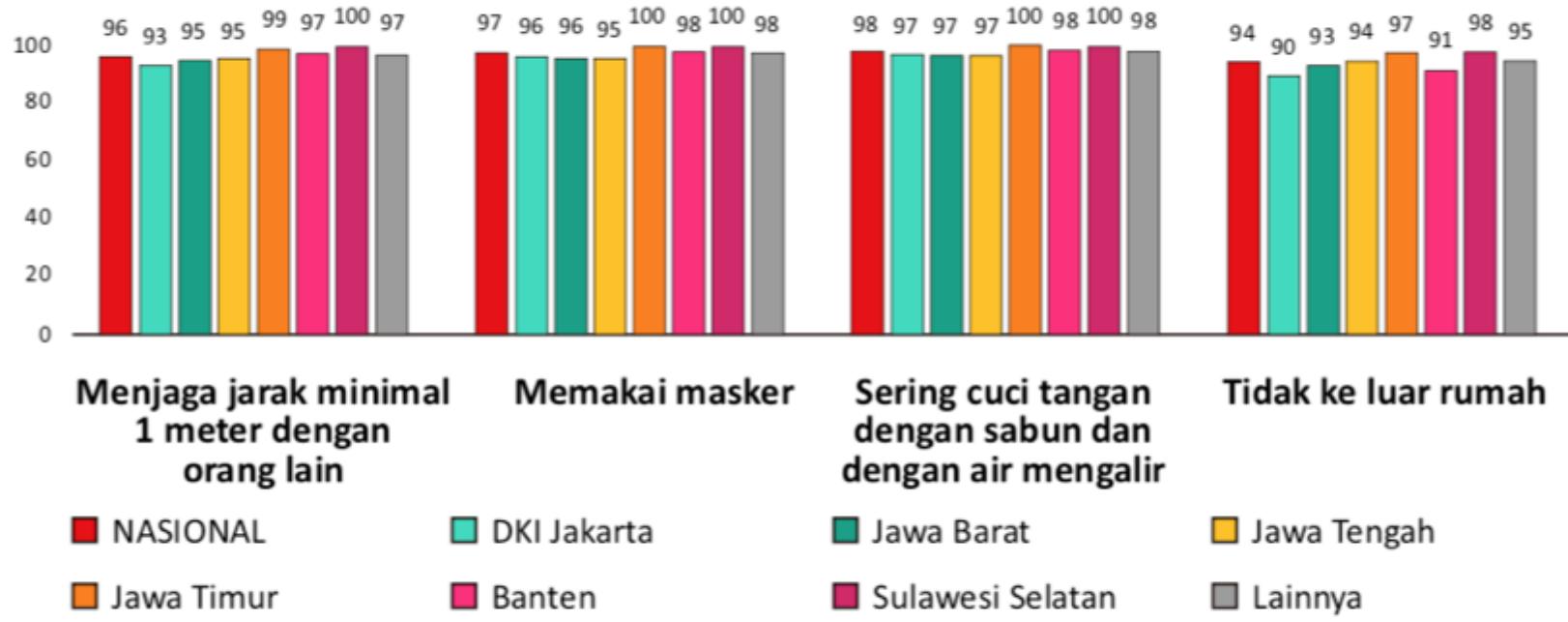




Anggaran untuk sosialisasi, penegakan PSBB, protokol New Normal...?

Apakah Ibu/Bapak percaya cara berikut bisa mencegah penularan Covid-19?...
(% PERCAYA) (Base: Warga yang Aware Covid-19)

Sumber: Saiful Mujani Research & Consulting



Hampir semua warga di setiap daerah percaya cara-cara ini bisa mencegah penularan Covid-19. Namun demikian, Warga DKI terlihat paling rendah tingkat keyakinanya dibanding warga daerah lain.

Social-Distancing & PSBB Yang Terukur



- Arahan Presiden Jokowi pd Satgas Covid-19 (tgl 10/6/2020): “1) Tugas besar belum selesai, kondisi masih dinamis; 2) Daerah jangan sembarangan memutuskan New Normal, perhatikan Rt (*effective reproductive number*), R₀ (*basic reproductive number*), dan tingkat kepatuhan masyarakat”.
- Semua Pemda (34 Provinsi, 496 Kab/Kota) telah membentuk Satgas Covid-19. PSBB diberlakukan di 3 Provinsi dan 7 Kab/Kota. Satgas Covid telah mengijinkan 102 Daerah di 23 Provinsi untuk memulai New Normal. Ironi: 25 Daerah yang mulai menerapkan New Normal justru masih kategori zona merah. Mis: Surabaya, Sidoarjo, Tangerang.

Pemotongan APBD 2020 Prov Sumbar



NO	OPD	APBD 2020 Awal	Pemotongan II 55%
1	Dinas Pendidikan	821,541,062,837	448,147,443,454
2	Dinas Kesehatan	163,902,390,266	87,998,081,398
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	422,247,358,796	250,055,357,763
4	Dinas PSDA	131,885,224,747	70,772,950,782
5	Dinas Perumahan Rakyat, Perkim	7,978,464,900	4,085,801,322
6	Sat pol PP	5,345,399,400	2,843,719,670
7	Kesbang Pol	6,179,179,782	3,272,048,836
8	BPBD	13,541,366,090	7,667,751,350
9	Dinas Sosial	90,141,688,392	47,802,643,890
10	Dinas Nakertrans	11,719,482,436	5,807,715,340
11	Dinas Pem.Perempuan & Anak	4,193,360,391	2,196,312,286
12	Dinas Pangan	19,914,608,902	10,382,304,846
13	Dinas Lingkungan Hidup	11,553,464,600	6,010,449,280
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB	5,177,324,000	2,501,588,155
15	Dinas PMD	23,478,846,642	12,701,832,188
16	Dinas Perhubungan	16,539,551,600	8,937,212,438
17	Dinas Kominfo	11,720,849,700	6,116,493,790
18	Dinas Koperasi dan UKM	17,216,949,180	8,480,842,744
19	Dinas PMD dan PTSP	7,906,331,291	4,107,150,944
20	Dinas Pemuda dan Olah raga	12,072,053,136	6,448,470,235
21	Dinas Kebudayaan	35,999,977,395	18,508,568,592
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5,642,565,300	3,079,761,135
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	42,976,607,762	21,592,305,274
24	Dinas Pariwisata	32,559,140,354	17,079,716,612
25	Dinas Tanaman Pangan	77,606,062,972	42,661,334,635
26	Dinas Peternakan	57,695,140,450	30,500,468,158
27	Dinas Kehutanan	30,684,822,500	16,548,287,525
28	Dinas ESDM	8,544,616,263	4,614,288,945
29	Dinas Perindag	14,860,999,154	6,213,247,010
30	Inspektorat	17,062,709,400	8,825,730,650
31	Bappeda	18,642,198,900	9,585,315,036
32	Badan Keuangan Daerah	42,689,075,848	21,546,914,215
33	BKD	10,707,412,400	5,804,737,455
34	BPSDM	13,531,243,500	6,553,581,925
35	Balitbang	5,501,415,472	2,463,728,395



APBD Kota Padang (Per 6 Mei 2020)



Uraian	Jumlah	% Total
	(jutaan rupiah)	Belanja APBD
Total Pendapatan	2.687.206.435.640	97,86
Pendapatan Asli Daerah	881.995.803.000	32,12
Dana Perimbangan	1.542.219.925.000	56,16
Pajak Daerah	641.697.775.000	23,37
Retribusi Daerah	105.298.028.000	3,83
Lain-lain Pendapatan	115.000.000.000	4,19
Total Belanja	2.745.995.435.458	100,00
Belanja Tidak Langsung	1.260.795.923.078	45,91
Belanja pegawai	1.204.669.708.974	43,87
Hibah	36.724.140.000	1,34
Bantuan sosial	12.920.780.000	0,47
Bantuan keuangan	888.309.104	0,03
Belanja tidak terduga	4.000.000.000	0,15
Belanja Langsung	1.485.199.512.380	54,09
Belanja pegawai	91.393.008.805	3,33
Belanja barang & jasa	866.800.110.526	31,57
Belanja modal	527.006.393.049	19,19
Pembiayaan Daerah	58.788.999.818	2,14
SiLPA	100.000.000.000	3,64
Pengeluaran	41.211.000.182	1,50
Surplus	58.788.999.818	2,14



Paradoks: Distrust vs. Solidaritas

okezone.com
#TauCepatTanpaBatas



economy

Selasa 14 April 2020 12:54 WIB

Hasil Survei: 89% Kepala Desa Tolak Mudik Lebaran 2020

Jurnalis - Taufik Fajar



KOMPAS TV
DIDI KEMPOT
KONSER AMAL DARI RUMAH
Penggalang Dana
SABTU, 11 APRIL - 19.00 WIB

www.kompas.tv

media

Konser Amal dari Rumah

Rp 6.057.220.175 terkumpul dari Rp 8.000.000.000

7093 Donasi

0 hari lagi

CAMPAIGN TELAH BERAKHIR

Informasi Penggalangan Dana

Penggalang Dana

Kompas TV Identitas terverifikasi

Menggalang untuk Bantu Mereka Kesulitan
Bekerja di Tengah Covid-19

TOLONG MENOLONG LAWAN COVID-19

Tolong Menolong Lawan COVID-19
Rp 9.013.322.718 terkumpul dari Rp 10.000.000.000

135813 Donasi

41 hari lagi

DONASI SEKARANG

Informasi Penggalangan Dana

Penggalang Dana

Rachel Venny Identitas terverifikasi

Penggalangan ini bagian dari
#BersamaLawanCorona

Catatan Penutup



1. Stimulus bagi penanggulangan Covid-19 dan kebijakan fiskal ekspansif lebih banyak dari APBN. Alokasi tambahan dari APBD tergantung inisiatif eksekutif di daerah.
2. Pentahapan dan penentuan prioritas menuju New Normal harus cermat. Tahap baru hanya dibuka jika tidak ada peningkatan kasus lagi. Prioritas pada sektor dg penularan rendah tapi dampak ekonomi tinggi (Mis: pertanian, manufaktur).
3. Dalam situasi krisis, pengawasan dan akuntabilitas dana stimulus cenderung lemah.
4. Kekuatan *civil society* yang akan membantu mempertajam prioritas dan memperkuat akuntabilitas anggaran.



THANK YOU

